

EKONOMI MORAL*

Mubyarto**

Saya akan membahas masalah yang mungkin bagi sementara orang akan terkesan kontradiktif. Dalam suatu pertemuan ilmiah pernah ada pernyataan lugu yang mengesankan pengeitian ekonomi sebagai sesuatu yang salah, yang tidak seharusnya diperkembangkan. Dinyatakan sebagai semacam protes bahwa "sekarang ini *kok* nampaknya pariwisata pun sudah diekonomikan"! Mudah-mudahan yang dimaksudkan adalah bahwa pariwisata sudah "dikomersialkan" bukan "diekonomikan". Dan pengeitian ekonomi memang berbeda dengan komersial, meskipun memang dalam buku-buku teks ekonomi diajarkan bahwa ekonomi yang maju adalah ekonomi yang semakin.komersial.

Pada tahun 1776 pada saat buku "ilmu ekonomi" pertama terbit, yang menandai kelahiran ilmu ekonomi modern, orang memisahkan unsur-unsur moral dan ekonomi. Penulis buku ini 17 tahun sebelumnya (1759), menerbitkan buku penting lain yang berjudul *The Theory of Moral Sentiment*. Perkembangan pemikiran "ekonomi" Adam Smith dalam 17 tahun adalah sedemikian rupa sehingga, meskipun *The Wealth of Nations* dianggap orang sebagai "kelanjutan" pikiran brilyan Adam Smith, tokoh orang melihat perubahan amat fundamental dari pemikirannya. Kalau dalam *The Moral Sentiment* pengejaran kepentingan diri (*self interest*) dikendalikan oleh rasa simpati pada orang lain, suatu pertimbangan moral (*moral judgement*), namun dalam *The Wealth of Nations* pengendalian ini dilakukan oleh (semangat) persaingan (*competition*), baik simpati maupun persaingan, keduanya merupakan "tangan tak kelihatan" (*invisible hand*) yang mampu mengatur mekanisme ekonomi menuju harmoni dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

* Pidato Dies Natalis VI Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 24 November 1988.

** Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM, dan Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM

Bahwa simpati atau tenggang rasa sebagai sentimen moral kemudian digantikan oleh persaingan yang didasarkan pada kebebasan alamiah (*laissez faire*) memang menarik. Dalam perkembangan selanjutnya memang, persaingan yang berubah menjadi amat berkuasa lalu "disalahgunakan" melalui aneka rupa "persekongkolan" (*conspiracy*) yang tidak saja tidak meningkatkan kesejahteraan umum tetapi bahkan bisa jelas-jelas merugikan kepentingan umum.

People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings by any law which either could be executed or would be consistent with liberty and justice. (Wealth of Nations, him. 128).

(Orang-orang seprofesi yang bisnisnya sama tidak terlalu sering bisa bertemu, bahkan untuk acara-acara santai non-bisnis, namun bila saling bertemu pembicaraan-pembicaraan mereka bersifat persekongkolan yang melawan kepentingan umum, atau dalam bentuk persekutuan untuk menaikkan harga-harga. Adalah tidak mungkin menghalangi pertemuan-pertemuan seperti ini melalui peraturan-peraturan perundang-undangan, karena peraturan-peraturan perundang-undangan yang demikian biasanya atau tidak bisa dipaksakan pematuhannya atau jarang bisa konsisten dengan kebebasan perorangan dan keadilan).

Konsep ekonomi moral yang akan kami bahas sekarang ini tidaklah sama sekali berbeda dengan moralitas yang mendasari pikiran Smith dalam *The Moral Sentiment*. Moralitas secara umum bisa diartikan sebagai (kepatuhan pada) aturan hidup yang bijaksana, yang berarti mengandung tujuan baik dan bagi kebaikan semua orang. Dan ekonomi moral tidak lain adalah suatu (aturan) kehidupan berekonomi di mana berbagai kepentingan ekonomi dalam masyarakat bersifat tenggang-menenggang (secara otomatis) tanpa perlu ada campur tangan pihak ketiga untuk mengembangkannya. Pihak ketiga ini dalam ekonomi modern memang cukup kuat

dan cukup berwibawa yaitu pemerintah, yang bertugas sebagai semacam polisi atau wasit yang menjaga terlaksananya aturan main dalam hidup berekonomi.

Istilah ekonomi moral abad 20 dipopulerkan oleh James Scott pada ulang tahun ke-200 lahirnya ilmu ekonomi melalui penerbitan bukunya *The Moral Economy of The Peasant* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Moral Ekonomi Petani*. Buku ini menganalisis kehidupan Derekonomi petani Vietman sejak sebelum bangsa Vietnam dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dan menguraikan bagaimana masyarakat tani bertahan dan kadang-kadang memberontak terhadap pihak luar atau kekuasaan sentral. Maka judul lengkap buku Scott adalah *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Fenomena-fenomena pemberontakan petani, seperti yang banyak ditulis juga oleh sejarawan Prof. Sartono Kartodirdjo di Indonesia, diterangkan dengan baik oleh Scott, sebagai sesuatu yang biasanya dilakukan oleh masyarakat tani yang sudah dalam keadaan sangat terdesak (kepepet). "It was the smallness of what was left rather than the amount taken that moved peasant to rebel".¹

Ekonomi Moral petani adalah ekonomi yang berdasarkan etika subsistem, yang menentang komersialisasi. Inilah sistem berekonomi yang menurut pengalaman mereka selalu bisa melindunginya dari serba kesukaran dan serba kesusahan. Ekonomi moral didasarkan pada pemahamannya dan penghargaan mereka pada konsep keadilan sosial dan keadilan sosial ini pada gilirannya diturunkan dari norma-norma resiprokal (balas membalas kebajikan) dan hak untuk hidup (the right to subsistence).

Argumentasi James Scott tentang berlakunya sistem ekonomi moral pada petani ini disanggah tuntas oleh Samuel Popkin dalam buku lain 3 tahun kemudian yaitu *The Rational Peasant* (1979). Kedua pengarang adalah rekan seprofesi. Popkin memang mempelajari buku Scott pada waktu masih dalam bentuk konsep sehingga bisa terbit tidak terlalu lama setelah terbitnya buku yang dikritiknya.

¹ James Scott, *The Moral Economy of the Peasant*, Yale, 1976, op.cit., him. 11.

Perbedaan atau pertentangan pendapat dari kedua penulis sangat jelas yaitu dalam hal perbedaan reaksi petani dalam menghadapi proses komersialisasi dan berkembangnya kapitalisme. Kalau Scott percaya bahwa ada landasan moral dan kelembagaan di pedesaan yang mampu mewujudkan suatu keadilan sosial, maka Popkin sebaliknya percaya bahwa kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa memerlukan hubungan rasional dengan ekonomi modern dari luar desa dalam bentuk dan proses komersialisasi.

Dalam buku kami, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia (LP3ES, 1988), kami mengembangkan pemikiran bahwa ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia mempunyai sistem dan moral tersendiri yang bisa dikenali, dan sifat-sifat sistem serta moral ekonomi Indonesia itu memang telah melandasi atau menjadi pedoman aneka perilaku ekonomi perorangan, kelompok-kelompok dalam masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan negara. Dan sistem serta moral yang dimaksud bersumber pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila menggambarkan secara utuh semangat kekeluargaan (gotong royong) dalam upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia.

Sama dengan penemuan Scott di Vietnam, kami berpendapat bahwa pada masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, ada semacam moralitas yang selalu dipertahankan, meskipun kadang-kadang moralitas itu mencerminkan perilaku yang tidak efisien atau tidak rasional, khususnya bila diukur berdasar teori ekonomi Neoklasik Barat. Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia yang demikian mengandung pada dirinya sifat-sifat positif yang menjamin keadilan sosial, dan menghalangi kesenjangan besar antara kaya dan miskin. Paling sedikit sistem dan moral ekonomi yang demikian menjamin tidak akan ada warga masyarakat desa yang akan mati kelaparan.

They are not radically egalitarian. Rather they imply only that all are entitled to living out of the resources-within the village, and that living is attained often at the cost of a loss of status and autonomy. They work, moreover in large measure through the abrasive force of gossip and envy and the knowledge that

abandoned poor are likely to be a real and present danger to better off villagers. These modest but critical redistribute mechanism nonetheless do provide a minimal subsistence insurance for villagers.¹

(Sistem itu) tidak cukup egalitarian. Namun (sistem itu) berarti bahwa semua (warga) berhak hidup dari sumber daya yang ada di desa, dan bahwa kehidupan itu sering diperoleh dengan hilangnya status (harga diri) dan otonomi. (Sistem itu) bisa bekerja, lebih-lebih lagi pada umumnya melalui kekuatan gosip dan keirihatian dan pengetahuan bahwa orang miskin yang disisihkan akan merupakan ancaman dan bahaya nyata bagi penduduk desa yang lebih berada. Meskipun demikian mekanisme distribusi yang sederhana tetapi cukup efektif ini memang benar-benar memberikan jaminan kehidupan minimal bagi penduduk desa.

Memang masyarakat pedesaan yang demikian mengandung pada dirinya kerawanan-kerawanan tertentu yang bisa mengancam kelangsungannya. Kerawanan-kerawanan itu adalah: (1) Ketidakseimbangan ekologis; (2) Sistem tanam monokultur; dan (3) fluktuasi-fluktuasi sebagai akibat sistem harga. Untuk mengatasi berbagai kerawanan tersebut, masyarakat pedesaan pada umumnya berhasil menemukan cara-cara untuk menanggulangnya, baik secara swadaya maupun melalui kegiatan-kegiatan non-pertanian. Memang di sana sini diperlukan bantuan dari masyarakat luar desa termasuk dari pemerintah "pusat". Namun upaya-upaya yang pada umumnya bersifat swadaya (menolong diri sendiri) inilah yang bisa disebut sebagai ekonomi moral yang bersifat manusiawi.

It is the absence of the threat of individual starvation which makes primitive society, in a sense, more human than market economy, and at the same time less economic.³

¹ Scott, idem, op.cit., hlm.5.

³ Kare Polanyi, The Great Transformation (1987) dikutip oleh Scott, hal. 5.

Ti adanya ancaman akan bahaya kelaparan perorangan inilah yang membuat masyarakat bersahaja dalam satu hal nampak lebih manusiawi ketimbang sistem ekonomi pasar, dan pada saat yang sama kurang ekonomis (atau kurang efisien).

Bahwa ekonomi Indonesia lebih menonjol sebagai ekonomi moral, dan bukan ekonomi yang terlalu rasional, pernah kami bahas dalam kaitan upaya menerangkan fenomena menurunnya efisiensi ekonomi Indonesia, khususnya pada periode ekonomi bonansa minyak 1973-1980. Pada periode ini efisiensi ekonomi nasional dan produktivitas amat menurun terutama karena menurunnya efisiensi sektor industri yang turun dari 2,12 pada tahun 1975 menjadi 0,49 pada tahun 1980. 4) Dan penurunan efisiensi sektor industri ini sangat jelas bersumber pada proteksi yang berlebihan (misalnya untuk industri tekstil 192 % dan industri kendaraan bermotor 718 % pada tahun 1980). Sumber kedua dari inefisiensi adalah bentuk pasar yang monopolistik. Efisiensi industri yang rendah sebagai akibat proteksi dan berkembangnya praktek-praktek monopoli kemudian menjadi "beban ekonomi" yang berat pada waktu kita harus mulai mengalihkan pasar barang-barang manufaktur dari pasar domestik ke pasar ekspor, yaitu sesudah penerimaan devisa kita jatuh akibat merosotnya harga minyak bumi di pasar dunia.

Toleransi bangsa Indonesia terhadap sistem dan cara kerja yang tidak efisien, nampaknya sudah merupakan bagian dari sistem nilai bangsa yang sudah berjalan lama. Ini berarti sama dengan toleransi atas berkembangnya "sistem" ekonomi biaya tinggi, yang antara lain juga merupakan akibat tidak langsung dari praktek-praktek korupsi di berbagai sektor ekonomi kita. Toleransi kita terhadap inefisiensi barangkali didasarkan pada pengalaman bahwa memang bangsa Indonesia mampu bertahan bertahun-tahun, meskipun ekonomi berjalan tidak efisien. Tetapi sebaliknya dirasakan pula bahwa gejala-gejala masyarakat mudah muncul ke permukaan jika masyarakat mulai merasakan ancaman-ancaman terhadap keadilan. Maka barangkali bisa disimpulkan bahwa dalam ekonomi Pancasila yang sangat menjunjung tinggi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat, rupanya apabila harus memilih antara

keadilan sosial dan efisiensi kita akan cenderung mengorbankan efisiensi. Efisiensi sebagai lawan keadilan rupanya analog dengan dilema (atau *trade off*) antara pertumbuhan dan pemerataan. Masyarakat Indonesia cukup cepat bereaksi menginginkan pemerataan pada waktu Pelita I sangat berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian ternyata diikuti meningkatnya ketimpangan ekonomi yang menyolok.

Bisakah kita secara lebih kongkrit mengamati bekerjanya ekonomi moral dalam praktek hidup sehari-hari? Dua peneliti dari Universitas Nasional Australia (ANU) pernah menghitung transfer pendapatan neto (*net transfer income*) dari 10 *desil* (klas) pendapatan keluarga.⁴ Dengan menggunakan data-data *Susenas* di DIY 1981 ditemukan dua kesimpulan yang menarik sebagai berikut.

Pertama, keluarga-keluarga di kota rata-rata menerima transfer pendapatan yang jauh lebih besar dibanding rata-rata keluarga di desa (17% di kota dibanding 2,7% di desa dari pendapatan total per tahun).

Kedua, keluarga-keluarga berpendapatan tinggi rata-rata menerima pendapatan transfer *neto* positif lebih besar dibanding rata-rata keluarga berpendapatan rendah (miskin). Dan fenomena ini nampak tidak berbeda di kota maupun di desa. Semakin kaya seseorang ternyata secara neto ia lebih banyak "menerima" daripada "memberi". Dan sebaliknya semakin miskin seseorang ternyata ia secara neto setiap tahunnya lebih banyak memberi daripada menerima.

Penemuan penelitian lain yang nampaknya sejalan dengan data tersebut telah kami diskusikan dengan para pejabat pemerintah daerah di propinsi Riau. Data pendapatan nelayan di sana meskipun relatif tinggi dibandingkan pendapatan rata-rata nelayan di Jawa, tokh termasuk salah satu yang terendah dalam masyarakat Riau. Dan pendapatan yang rendah ini antara lain disebabkan oleh adanya berbagai pungutan (baik resmi maupun tidak resmi). Seandainya pungutan-pungutan tersebut

⁴ Martin Ravallion and L. Dearden, The Distributional out comes of A "Moral Economy", Working Paper, 1986

hilang, suatu hal yang hampir mustahil, maka pendapatan mereka bisa meningkat menjadi 5 atau 10 kali lebih besar!

Sebenarnya hal ini bukanlah fenomena baru dalam perekonomian pedesaan kita. Kurang berkembangnya ekonomi komoditi perkebunan rakyat seperti karet, kelapa dan kini juga cengkeh, antara lain juga disebabkan terlalu banyaknya "pungutan" atas penerimaan petani, sehingga untuk karet misalnya petani hanya menerima paling banyak 40% dari harga *fob*. Harga yang rendah dan tidak adanya perangsang untuk meningkatkan mutu hasil produksi petani, tidak memberikan gairah bagi upaya peningkatan produksi. Maka dalam hal karet rakyat misalnya, sistem PIR BUN yang dikenalkan pemerintah sejak 1977 ditujukan antara lain untuk meningkatkan penerimaan petani karet menjadi paling sedikit 70% dari harga *fob*.

Salah satu manifestasi yang amat jelas dari eksistensi ekonomi moral di Indonesia sampai sekarang adalah masih adanya dualisme dalam hampir semua cabang dan sektor perekonomian kita. Boeke, seorang ahli ekonomi Belanda yang terkenal, memperkenalkan teori *dualisme* ekonomi ini pada tahun 1910 yang diperluas dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ekonomi Universitas Leiden pada tahun 1930. Ciri-ciri khas *dualisme ekonomi*, *dualisme sosiologi* dan *dualisme teknologi* adalah bahwa dua sistem, yang satu modern, dan yang lain tradisional, hidup berdampingan secara mapan dan langgeng tanpa ada tanda-tanda untuk berbaur menjadi satu. Sistem hubungan dualistik ini memang rupanya justru "memberi kesempatan" atau "hak" yang sama bagi sektor tradisional maupun sektor modern dalam perekonomian Indonesia untuk berkembang atau berjalan sesuai "aturan main" masing-masing. Inilah yang kini kita kenal dengan pengertian sektor formal (modern) dan sektor informal (tradisional). Apabila kita renungkan secara mendalam pemakaian istilah ini memang terasa sedikit kurang adil, karena sektor tradisional yang jauh lebih tua dan menyangkut hajat hidup orang yang lebih banyak (kira-kira 70% tenaga kerja), malahan dianggap sektor informal (tak resmi) yang cenderung dianggap "menggangu" sektor formal (resmi) yang modern yang notabene datang belakangan, terutama yang datang sebagai bagian dari masuknya sistem kapitalisme

ke Indonesia pada akhir abad 19. Kita berharap bahwa di kalangan para penentu kebijaksanaan ekonomi kita ada pemahaman mendalam bahwa sebenarnya sektor ekonomi kita ada pemahaman mendalam bahwa sebenarnya sektor ekonomi rakyat banyaklah yang patut disebut *sektor resmi* (formal) yang memerlukan perlindungan dan pelayanan lebihserius dan lebih manusiawi dari pemerintah. Mereka itulah berdasar anafisis ini yang sebenarnya termasuk *sektor swasta* dalam arti kata yang sebenarnya, yang muncul dan berkembang secara alamiah tanpa bantuan dan fasilitas apapun dari pemerintah. Sedangkan sebaliknya sektor *swasta modern* yang kuat yang kita masukkan sebagai sektor "*formal*", berdasarkan pengalaman memang telah berkembang pesat menjadi raksasa-raksasa ekonomi Indonesia melalui aneka fasilitas, proteksi dan pemberian hak-hak monopoli yang kadang-kadang amat besar. Apabila latar belakang yang demikian disadari benar-benar, maka sikap kita terhadap sektor "*formal yang tradisional*" kiranya akan jauh lebih *simpatik* (atau lebih *moralistik* menurut Adam Smith, tahun 1759) dan lebih manusiawi.

Apabila dari uraian ini masih ada orang yang bertanya "kalau begitu apa pedoman politik ekonomi yang moralistik bagi bangsa Indonesia", maka jawabannya kita kembalikan pada Pancasila dan UUD 1945 khususnya pasal-pasal 33, 27 ayat 2 dan pasal 34. Pancasila sudah jelas merupakan acuan *moralfilosofis* bagi sistem ekonomi moral kita. Dan ketiga pasal UUD 1945 tersebut merupakan pedoman politik ekonomi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sistem Ekonomi Indonesia yang bisa disebut sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi moralistik yang bersifat kerakyatan di mana koperasi merupakan *sokogurunya*. Dan bagaimana menjalankan politik ekonomi yang merakyat dan moralistik juga cukup jelas dipedomani oleh pasal 33 ayat 1 yaitu ekonomi (perekonomian) disusun sebagai *usaha bersama* dan didasarkan atas asas kekeluargaan. Suatu politik ekonomi yang mampu secara terus menerus merangsang bentuk usaha bersama yang dikendalikan secara *kekeluargaan*, harus secara komprehensif mengakui adanya multi-strata masyarakat ekonomi kita, yang jelas

jauh lebih kompleks dari sekedar pembagian menjadi 3 sektor (negara, koperasi dan swasta). Memang, secara umum benar bahwa *trisektor ekonomi* kita ada tiga yaitu:

- (1) Sektor ekonomi negara yang berfungsi melayani dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat banyak (pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3);
- (2) Sektor ekonomi swasta yang berorientasi keuntungan dan berfungsi memupuk modal masyarakat; dan
- (3) Sektor ekonomi koperasi yang asosiatif, dan bersifat swadaya untuk memperjuangkan secara terus-menerus kepentingan ekonomi anggota-anggotanya.

Trisektor ekonomi ini bisa secara mudah kita kaitkan dengan trilogi pembangunan yaitu stabilitas ekonomi yang mantap dan dinamis yang merupakan tugas negara, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibebankan pada sektor ekonomi swasta, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang terutama dilaksanakan melalui sektor ekonomi koperasi.

Hanya melalui pelaksanaan trilogi pembangunan inilah kita mampu mewujudkan cita-cita bangsa melalui perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional yaitu (1) pemberian pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi semua warga negara Indonesia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945), (2) mengenyahkan kemiskinan dari bumi Indonesia (pasal 34), dan (3) menghilangkan ketimpangan-ketimpangan ekonomi dan sosial (pasal 33 ayat 3).

Demikian kiranya jelas bahwa ekonomi moral yang tidak semata-mata *rasional* harus kita akui sudah cukup melekat pada sistem nilai dan budaya bangsa Indonesia. Meskipun kita secara terbuka ingin mengikis habis sifat-sifat irrasional yang tercermin dalam efisiensi dan produktivitas yang rendah dalam perekonomian kita, toch pada akhirnya kita menghadapi "tantangan" berupa moral ekonomi bangsa yang tidak sepenuhnya bersifat negatif. Dalam hati nurani kita sebagai bangsa masih selalu terselip perasaan was-was "jangan-jangan pengambilan pilihan yang semata-mata rasional justru akan merugikan dalam jangka panjang dan justru akhirnya akan kita sesali".

Bahwa dalam kenyataan perekonomian kita masih bersifat, dualistik hampir dalam semua bidang, lebih mengharuskan lagi bagi kita untuk tidak selalu terdorong membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang terlalu seragam yang diharapkan berlaku bagi semua sektor dan sub-sektor ekonomi kita. Lebih-lebih dalam menghadapi sektor modern dan sektor tradisional, yang secara kurang tepat (atau barangkali kurang adil) disebut sektor formal dan sektor informal, yang tidak jarang kedua sektor itu memproduksi barang dan jasa yang sama bagi masyarakat, kebijaksanaan pelayanan atau perlindungan terhadap keduanya harus tidak bersifat seragam. Kebijakan yang seragam dalam hal ini pasti bisa menguntungkan sektor yang satu, tetapi sekaligus me-rugikan sektor yang lain. Justru dalam hal ini moral ekonomi mengharuskan perlakuan (pembinaan?) berbeda. Perlakuan berbeda tidaklah berarti mem-proteksi yang satu dengan menghukum yang lain, atau mensubsidi yang satu sambil memajaki yang lain. Moral ekonomi mengajarkan diterapkannya kebijaksanaan yang setepat-tepatnya, sesuai sifat dan kondisi pelaku ekonomi yang bersangkutan, sehingga berakibat merangsang gairahnya dalam berekonomi, dan tidak mematikannya. Sebaliknya ajaran moral ekonomi melarang penerapan kebijaksanaan ekonomi yang bisa mengundang munculnya ciri-ciri negatif demokrasi ekonomi yaitu yang etatistik, monopolistik dan persaingan gontokan bebas tanpa aturan.

Perekonomian Indonesia masa datang yang moralistik memberi tempat yang sah, wajar dan terhormat, kepada semua kepentingan ekonomi, yang kecil-lemah maupun yang kuat, untuk berperan positif dalam pembangunan nasional. Kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada motto Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam tetapi semua bersemangat kekeluargaan.***